



Seorang Warga Bingung KMS-nya
 • Sambungan Hal 13

gas eceran, masih memiliki tanggungan seorang anak yang masih sekolah di SMPN 4 Yogyakarta.

"Harapan saya masih bisa disusulkan (KMS) tahun ini. Tapi kata Dinsos *nggak* bisa, karena sudah ditandatangani, bisanya lagi tahun depan," terangnya.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menjelaskan, dicabutnya KMS, Amirul akan menambah beban biaya, jika ada kegiatan piknik sekolah atau kegiatan sekolah yang tidak ter-cover Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

"Apalagi kondisinya yang hanya berdagang gas tabung dengan keuntungan yang tidak seberapa dan ditambah kondisi istrinya yang sedang sakit, karena ditabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab," bebernya.

Segera klarifikasi
 Terkait hal tersebut, Forpi akan melakukan klarifikasi yang akan dilakukan mulai dari tingkat bawah yakni RT, Kelurahan, Kecamatan hingga Dinas Sosial Pemkot Yogyakarta.

"Klarifikasi juga akan dilakukan di rumah atau tempat tinggal warga yang mengadu. Termasuk jumlah keluarga yang sebenarnya, apakah memang benar ada keluarganya yang sudah bekerja. Jangan sampai jika memang ada persoalan pribadi atau konflik antara pengurus RT atau wilayah dengan warga menimbulkan *like and dislike*," tegas Kamba.

Ia menambahkan, Forpi berharap, data-data terkait dengan warga haruslah diberikan secara jujur dan tidak ada yang ditutupi.

"Jika memang warga berhak mendapatkan KMS, maka berikanlah. Jangan sampai program KMS salah sasaran karena akan merugikan yang seharusnya layak dapat KMS," tandasnya.

Bahan evaluasi
 Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bejo Suwarno menjelaskan, tidak semua masyarakat melaporkan perubahan yang terjadi di keluarga penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

"Aduan akan kami cek lagi. Kami dengan Wali Kota nanti mengevaluasi untuk tahun depan. Tiap apa-apa *kari* ada uji publik, kadang-kadang mereka *nggak update*. Lalu di RT RW ada masukan. Mungkin skor-skornya dievaluasi," bebernya.

Mengenai kemungkinan adanya suka dan tidak suka yang memengaruhi hasil survei KMS, Bejo menjamin hal tersebut tidak terjadi.

"Kalau untuk petugas survei, kami silang. Jadi Kecamatan A, petugasnya dari Kecamatan B. Tidak saling kenal dan tidak ada unsur kedekatan," tandasnya.

(kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005